

ABSTRAK

Dalam pembentukan usaha pertambangan, pemilik harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu, izin merupakan syarat administrasi yang harus didapatkan oleh pengusaha. Izin ini dapat diperoleh dari pemerintah, karena izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa. Syarat dalam perizinan itu bersifat konstitutif dan kondisional, bersifat konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum terhadap penerapan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang ? dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggalan tambang ilegal di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang? Tujuannya untuk mengetahui kepastian hukum izin pertambangan dan untuk mengetahui faktor apa penyebab terjadinya tambang ilegal. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui data primer didapat dilapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlalu terlaksana. Hal itu diakui sebagai penghambat dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Tetapi implementasi kepastian hukum terhadap kebijakan izin usaha pertambangan yang lain telah terpenuhi seperti pada persyaratan administratif. Pelaku yang melakukan pertambangan ilegal di Kecamatan Tegalwaru memiliki latar belakang yang di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, faktor ekonomi, faktor ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, Sulitnya mendapatkan IUP, Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum.

Kata Kunci: pertambangan, izin, ilegal

ABSTRACT

In the formation of a mining business, the owner must first obtain a business license, the permit is an administrative requirement that must be obtained by the entrepreneur. This permit can be obtained from the government, because the permit is an approval from the authorities. The conditions in the permit are constitutive and conditional, constitutive in nature because it determines a certain act or behavior that must be fulfilled. In this study, the problem raised is how legal certainty is regarding the application of mining business permits based on Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal in Tegalwaru District, Karawang Regency and what are the factors that cause illegal mining in Tegalwaru District, Karawang Regency. The aim is to find out the legal certainty of mining permits and to find out what factors cause illegal mining. The research uses an empirical juridical approach, namely researching and examining the object of research through primary data obtained in the field. The results of this study are the implementation of the mining business permit policy has not been maximized. As in the technical requirements and environmental requirements have not been implemented. This is recognized as an obstacle in the management of mining business permits. However, the implementation of legal certainty for other mining business license policies has been fulfilled, such as the administrative requirements. The perpetrators who carry out illegal mining in the Tegalwaru District have a background that is influenced by certain factors, economic factors, the factor of wanting to avoid the obligations that have been determined, the difficulty of obtaining an IUP, the lack of socialization of laws and regulations, weak law enforcement.

Keywords: mining, permit, illegal

